PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2027



SARILAMAK,
TAHUN 2026

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 36 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 September 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2027



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
    c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
    d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
    e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
    a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
    b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
    d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
    e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
    f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
    k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
    p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
    q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
    r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
    s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
    t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
    v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
    x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
    y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 11
1.3. Maksud dan Tujuan 12
1.4. Sistematika Penulisan 12
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 23
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah 30
3.3. Program dan Kegiatan (di Tahun 2027 dalam Renstra) 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 43
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 71
5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 72
5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 74
BAB VI PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 3

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2026 15
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 20
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 25
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 29

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 – 2030 31
Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah 32
Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Pendukungan Prioritas Kabupaten 36
Tabel 3. 4 Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 38

Tabel 4. 1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENCANA KERJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA 44
Tabel 4. 2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2027 70

Tabel 5. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025 - 2030 73
Tabel 5. 2 INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2030 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-2029. Adapun rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini berdasarkan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didasari oleh Visi dan Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

I. Persiapan penyusunan;
II. Penyusunan rancangan awal;
III. Penyusunan rancangan;
IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas
V. Perangkat Daerah;
VI. Perumusan rancangan akhir;
VII. Penetapan.

I. Persiapan Penyusunan;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diadakan orientasi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh Kepala Bagian yang terkait dengan perencanaan pada Bagian masing-masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal Penyusunan Rencana Kerja.

II. Penyusunan Rencana Kerja;

Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Puluh Kota Nomor 000.7.2.4/261/5/Bapelitbangda-LK/III/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2027. Penyusunan Rencana Kerja

mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan;
e. Penutup.

Berikut adalah Tabel Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

Tabel 1. 1 Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Rencana Kerja 2027																																						
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja																																						
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja																																						
3	Orientasi Mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah																																						
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																						
B	Penyusunan Rencana Kerja 2027																																						
1	Penyusunan Rencana																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Kerja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD																																						
2	Penyampaian Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																						
3	Verifikasi Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																						
C	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																																						
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran,																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah																																						
D	Penyusunan Rencana Kerja 2027																																						
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																						
2	Penyampaian Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																						
3	Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E	Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027																																								
1	Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																								
2	Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Daerah Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																								
F	Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2027																																								
1	Penyampaian Rencana Kerja Semua Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																								
2	Penetapan Draft Perkada Rencana Kerja menjadi Perkada Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah																																								

III. Penyusunan Rencana Kerja;

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah tahap penyusunan. Penyusunan merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rencana Kerja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rencana Kerja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu keempat bulan Juli 2026.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbangda dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang diatur oleh Bapelitbangda pada tanggal 2 Maret 2026, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rencana Akhir Rencana Kerja;

Perumusan Rencana Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2026 yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

VI. Penetapan.

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahap akhir dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Kerja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

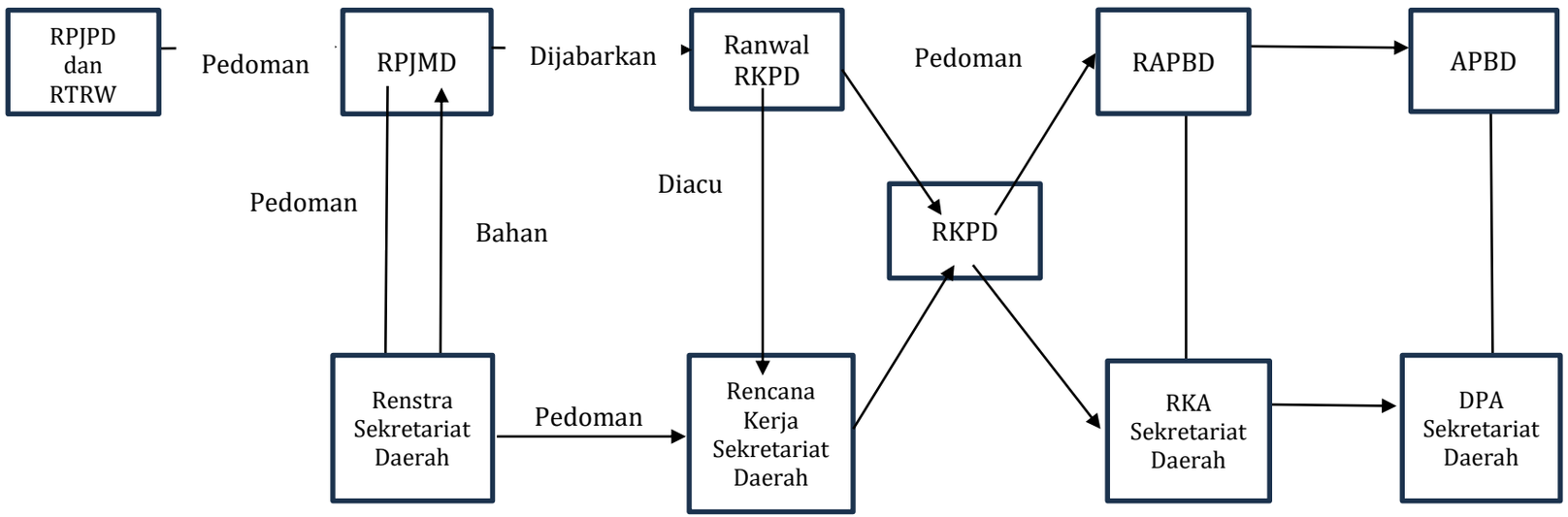
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Dilanjutkan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan

masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah Pusat/Provinsi.

Adapun keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada Bagan berikut :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 21).
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 ini adalah :

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini adalah :

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra .
- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027.
- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan hubungan dengan dokumen RKPD serta sistematika laporan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang tujuan yang hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada Tahun 2027 serta pendanaan kegiatan pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab suatu perangkat daerah selama periode tertentu.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu tahun 2025 (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) pada Tahun Anggaran 2026, memiliki 3 (Tiga) Program yang diwujudkan dengan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan. Dimana pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 (Sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sedang berjalan Tahun 2026.

Berikut ini ditampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 di Sekretariat Daerah beserta realisasi anggarannya.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025-2029)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2026	
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	100%	100%	100%	90.83%	90.83%	100%	100%	100%
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	96.48%	96.48%	100%	100%	100%
4.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	92.04%	92.04%	100%	100%	100%
4.01.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	93.33%	93.33%	100%	100%	100%
4.01.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	80.98%	80.98%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025-2029)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2026	
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	91.22%	91.22%	100%	100%	100%
4.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	95.38%	95.38%	100%	100%	100%
4.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%	87.17%	87.17%	100%	100%	100%
4.01.01.2.11	Kegiatan : Administrasi keuangan dan opersional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase terlaksana adminitrasi keuangan dan operasional KDH	100%	100%	100%	91.94%	91.94%	100%	100%	100%
4.01.01.2.12	Kegiatan : Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumah tanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%	100%	100%	82.00%	82.00%	100%	100%	100%
4.01.01.2.13	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase terfasilitasinya kelembagaan pelayanan publik tata laksana dan reformasi birokrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	98.41%	98.41%	100%	100%	100%
4.01.01.2.14	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	90.16%	90.16%	100%	100%	100%
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	94.06%	94.06%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025-2029)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2026	
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.2.01	Kegiatan : Administrasi Tata pemerintahan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	92.68%	92.68%	100%	100%	100%
4.01.02.2.02	Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang disusun	100%	100%	100%	93.35%	93.35%	100%	100%	100%
4.01.02.2.03	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	94.34%	94.34%	100%	100%	100%
4.01.02.2.04	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	95.85%	95.85%	100%	100%	100%
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	90.00%	90.00%	100%	100%	100%
4.01.03.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Persentase Pelaksanaan Kebijakan perekonomian 2. Nilai transaksi saham per kapita 3. Total dana pihak ketiga per PDRB 4. Total kredit per PDRB 5. Rasio PDRB sektor jasa keuangan	100%	100%	100%	83.62%	83.62%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2025-2029)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2026	
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2025	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.03.2.02	Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	95.03%	95.00%	100%	100%	100%
4.01.03.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	93.28%	93.28%	100%	100%	100%
4.01.03.2.04	Kegiatan: Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1. Persentase Pemantauan kebijakan SDA yang difasilitasi 2. Konsumsi listrik per kapita	100%	81%	100%	88.05%	88.05%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2025, antara lain: NIHIL

II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi keuangannya adalah sebesar 90.83%, secara fisik realisasi kegiatan sudah mencapai 100%.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi keuangannya adalah sebesar 94.06%, secara fisik realisasi kegiatan sudah mencapai 100%.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi keuangannya adalah sebesar 90.00%, namun secara fisik realisasi kegiatan sudah mencapai 100%.

III. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2025, antara lain: NIHIL

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik IKU Kepala Daerah maupun IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel 2.2 di halaman berikut ini:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKD	IKU KD	IKU SETDA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	Indeks Pelayanan Publik			IKU		4.31	4.35	4.40	4.44	4.21	Belum Tersedia	4.40	4.44	Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		IKK	IKU		62.98	64.28	65.78	66.71	62.09	Belum Tersedia	65.78	66.71	Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah		IKK	IKU		90%	90%	90%	90%	87,01	Belum Tersedia	90%	90%	Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
4	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)		IKK	IKU		95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Belum Tersedia	95.00	95.00	Realisasi Capaian Tahun 2025 telah mencapai target yang Ditetapkan Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Sekretariat Daerah)		IKK	IKU	√	70	70.10	70.12	70.15	70.19	Belum Tersedia	70.12	70.15	Implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKD	IKU KD	IKU SETDA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan		IKK	IKU		80.00	81.00	82.00	83.00	85.00	38,38%	82.00	83.00	Realisasi Capaian Tahun 2025 telah mencapai target yang Ditetapkan Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
7	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi		IKK	IKU		100%	100%	100%	100%	85%	Belum Tersedia	100%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2025 telah mencapai target yang Ditetapkan Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
8	Indeks Tata Kelola pengadaan		IKK	IKU		78.6	81.50	82.50	84.50	78.02	46%	82.50	84.50	OPD sudah memanfaakan SPSE untuk memproses pengadaan barang dan jasa · Realisasi Capaian Tahun 2025 telah mencapai target yang Ditetapkan Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
9	Indeks ABS-SBK		IKD	IKU	√	2.10	2.14	2.18	2.22	2.31	Belum Tersedia	2.18	2.22	Bertambahnya Partisipasi Nagari dalam melakukan pengisian Kuesioner untuk penilaian Indeks ABS-SBK Tahun 2025 Realisasi Capaian Tahun 2025 telah mencapai target yang Ditetapkan Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKD	IKU KD	IKU SETDA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Indeks Reformasi Hukum		IKU		√	70.00	73.00	76.00	79.00	98.24	Belum Tersedia	76.00	79.00	Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan ketertiban administasi dalam harmonisasi Produk Hukum Daerah Realisasi Capaian Tahun 2025 telah mencapai target yang Ditetapkan Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
11	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah		IKD	IKU		3.10	3.12	3.14	3.16	2.6735	Belum Tersedia	3.14	3.16	Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target
12	Persentase terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		IKK	IKK		100%	100%	100%	100%	100%	Belum Tersedia	100%	100%	Proyeksi Realiasi Capaian pada Tahun 2027 dan 2028 adalah Sesuai dengan Target

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah terhadap *stakeholder*nya;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Aplikasi SIPD RI.
   Penerapan aplikasi SIPD RI untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya Bappelitbangda dalam peningkatan pelayanan pada stakeholders. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka, penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana;
2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui *Whatsapp group;*
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang di Bappelitbangda. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat turut ditingkatkan;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:

1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum konsistennya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat nagari sampai Kabupaten dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
5. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;

2.4. Review terhadap RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam RKPD, karena pada hakikatnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RKPD. Pada akhirnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini juga akan mengalami penyempurnaan setelah RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Disini dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Program, kegiatan, rumusan-rumusan serta besaran-besaran yang terdapat pada RKPD tidak terdapat perubahan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah bersifat Fasilitasi dan koordinasi yang rutin dilaksanakan.

Adapun hasil perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Review terhadap RKPD Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**		**setda**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**52,500,000,000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**		**setda**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**25,509,625,105**		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah	100%	571,575,150	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah	100%	20,000,000		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	100%	15,092,375,162	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	100%	17,791,602,027		
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Setda	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	79,895,050	3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Setda	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	1,965,000		
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	403,500,000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	0%			
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	1,985,288,550	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	654,081,900		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Presentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	15,320,045,702	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Presentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	750,625,905		
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Pesentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	5,263,929,350	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Pesentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	2,318,120,000		
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik	100%	8,610,795,850	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik	100%	1,007,000,000		
	9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	100%	871,172,436	9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	100%	939,676,473		
	10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Setda	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggan KDH, Wakil KDH dan SEKDA	100%	1,957,798,800	10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Setda	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggan KDH, Wakil KDH dan SEKDA	100%	926,554,000		
	11	Penataan Organisasi	Setda	OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	228,510,450	11	Penataan Organisasi	Setda	OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	50,000,000		
	12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda	Terfasilitasi dan terlayaninya kegiatan KDH/WKDH	100%	2,115,113,500	12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda	Terfasilitasi dan terlayaninya kegiatan KDH/WKDH	100%	1,049,999,800		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**Setda**	**Presentase terlaksananya koordinasinya Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**10,265,230,000**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**Setda**	**Pesentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**3,745,000,600**	
	13	Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan	100%	199,673,670	13	Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan	100%	33,060,000	
	14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkooordinasi	1005	9,531,390,983	14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkooordinasi	100%	3,610,000,000	
	15	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Setda	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	300,300,240	15	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Setda	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	50,000,600	
	16	Fasilitasi Kerjasama daerah	Setda	Persentase pelaksanaan Kerjasama daerah	100%	233,865,107	16	Fasilitasi Kerjasama daerah	Setda	Persentase pelaksanaan Kerjasama daerah	100%	51,940,000	
3	**Program Perekonomian dan pembangunan**		**Setda**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasui perekonomian**	**100%**	**840,700,000**	**Program Perekonomian dan pembangunan**		**Setda**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasui perekonomian**	**100%**	**150,000,000**	
	17	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	192,502,546	17	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	30,000,000	
	18	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Setda	Persentase pelaksanaan pembangunan daerah	100%	224,905,410	18	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Setda	Persentase pelaksanaan pembangunan daerah	100%	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	255,653,412	19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	50,000,000	
	20	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Setda	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	94%	167,638,632	20	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Setda	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	94%	20,000,000	
Total						**63,605,930,000**	**Total**					**29,404,625,705**	

Perbandingan antara rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi dan mendukung prioritas kepala daerah.

Rencana kerja biasanya disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan evaluasi tahun sebelumnya. Namun, melalui analisis kebutuhan, ditemukan kondisi aktual seperti kebutuhan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, digitalisasi pelayanan administratif, atau peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Proses ini penting dilakukan untuk:
- Menyesuaikan program dengan kebutuhan faktual,
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran,
- Menyusun perencanaan yang berbasis kinerja dan data,
- Meningkatkan efisiensi dukungan terhadap fungsi strategis kepala daerah.

Dengan demikian, RKPD Sekretariat Daerah menjadi lebih responsif, akuntabel, dan selaras dengan tuntutan pelayanan pemerintahan yang dinamis.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, bahwasanya Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Demi menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan. Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Rencana Kerja ini mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

A. Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta Meningkatkan peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

B. Sasaran

1. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum.
2. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan.
3. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 – 2030

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta Meningkatkan peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	62.98	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76
			Indeks Pelayanan Publik	4.31	4.35	4.40	4.44	4.49	4.54
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	95	95	95	95	95	95
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	62.98	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
			Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Tata Kelola pengadaan	78,60	81,50	82,50	84,50	86,40	88,40
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks ABS-SBK	2,10	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30
			Indeks Reformasi Hukum	70	73	76	79	82	85
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90	2,92	2,94	2,96	2,98	3,00

3.3. Program dan Kegiatan (di Tahun 2027 dalam Renstra)

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2027 dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	7 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		8 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		9 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		12 Fasilitasi Kunjungan Tamu
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		14 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		16 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		18. Pengadaan Meubeleur
		19. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		20 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		23 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		27 Pemeliharaan Mebel
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		32 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah
	8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33 Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/wakil KDH
		34 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		35 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		36 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	9. Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		38 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		39 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	10. Penataan Organisasi	40 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		41 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		42 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		43 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		44 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	45 Fasilitasi Keprotokolan
		46 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		47 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12. Administrasi Tata Pemerintahan	48 Penataan Administrasi Pemerintahan
		49 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		50 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	13. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	51 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	14. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	52 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		53 Fasilitasi Bantuan Hukum
		54 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	15. Fasilitasi Kerjasama Daerah	55 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		56 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		57 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	16. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	58 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		59 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		60 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
	17. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	61 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		62 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		63 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	64 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		65 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
		66 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	19. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	67 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
		68 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		69 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Seluruh pendanaan kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2027, yang dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan menurut Permendagri No. 90 Tahun 2019 pada dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja) tahun 2027 Sekretariat Daerah ini.

Selain itu, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah juga dikelompokkan berdasarkan pendukungan terhadap prioritas Kabupaten, seperti Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya SAKATO BERMARTABAT, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih SAKATO BERINTEGRITAS. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah pendukungan prioritas kabupaten secara lengkap dapat dibaca pada tabel 3.3 di halaman berikut ini:

Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Pendukungan Prioritas Kabupaten

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1.	Program Prioritas pencapaian Misi 1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.1.700.000.000,-
2.	Program Prioritas pencapaian Misi 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.519.531.408,-
3.	Program Prioritas pencapaian Misi 9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp.3.500.000.000,-

Berdasarkan tabel. 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendukungan Prioritas Kabupaten yang ada di Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Program Prioritas pencapaian Misi 1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama terdapat 1 Program kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan 1 Kegiatan yaitu Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan 1 sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan total pagu Rp.1.700.000.000,-
2. Program Prioritas pencapaian Misi 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial terdapat 1 Program kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan 1 Kegiatan yaitu Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

dan 1 sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan total pagu Rp.519.531.408,-

3. Program Prioritas pencapaian Misi 9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu terdapat 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 1 Kegiatan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 1 sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan total pagu Rp.3.500.000.000,-

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2027 juga dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini :

Tabel 3. 4
Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dan Perkiraan Maju Tahun 2028
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
	SEKRETARIAT DAERAH				29,404,625,705				53,532,234,695
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				29,404,625,705				53,532,234,695
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				29,404,625,705				53,532,234,695
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah*		100%	25,509,625,105				42,188,400,000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	1,594,694,669
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	17,791,602,027	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Tambahan, Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK; Pendanaan Asli Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	Iku Sekretariat Daerah	-	15,348,400,505
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi barang milik daerah*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	1,965,000	Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	55,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	654,081,900	Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil.	Iku Sekretariat Daerah	-	3,162,601,800
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	750,625,905	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Bagi Hasil;	Iku Sekretariat Daerah	-	4,274,484,580
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	2,318,120,000	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	5,473,717,350
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	1,007,000,000	DBH, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	6,228,794,140
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	939,676,473	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	926,052,436
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggan KDH, Wakil KDH dan SEKDA*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	926,554,000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	2,559,037,800
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	50,000,000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	365,616,720

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Terfasilitasi dan terlayaninya kegiatan KDH/ WKDH*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	1,049,999,800	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	2,200,000,000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	*Persentase terlaksananya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat*		100%	3,745,000,600			-	10,486,314,695
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	33,060,000	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	203,667,144
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	3,610,000,000	Dana Alokasi Umum , DBH, Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan, Pendapatan Asli Daerah , Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	Iku Sekretariat Daerah	-	9,822,014,203
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	50,000,600	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	306,306,245

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	51,940,000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	154,327,103
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	*Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian*		100%	150,000,000			-	857,520,000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	30,000,000	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	196,358,597
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase pelaksanaan pembangunan daerah*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	50,000,000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	229,403,518
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	50,000,000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	260,766,480

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan*	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	20,000,000	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	170,991,405
J U M L A H					29,404,625,705				53,532,234,695

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027 dikelompokkan dalam 1. Unsur, yaitu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dengan 3 Program, 20 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.4 pada bab III sebelumnya. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2027 secara lengkap dapat dibaca pada tabel 4.1 di halaman berikut:

Tabel 4. 1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENCANA KERJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SEKRETARIAT DAERAH			**37,532,316,331**	**40,418,981,415**		**29,404,625,705**							**53,532,234,695**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**37,532,316,331**	**40,418,981,415**		**29,404,625,705**							**53,532,234,695**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**37,532,316,331**	**40,418,981,415**		**29,404,625,705**							**53,532,234,695**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		**25,993,736,107**	**27,208,611,515**	100%	**25,509,625,105**						100%	**42,188,400,000**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			235,539,336	54,511,900	100%	20,000,000					-	100%	1,594,694,669	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	162,340,626	16,000,000	5 dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		5 dok	854,528,036	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 dok	73,198,710	38,511,900	6 dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		6 dok	740,166,633	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,552,748,972	16,600,685,242	100%	17,791,602,027					-	100%	15,348,400,505	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	233 Org	14,420,355,614	16,369,804,942	233 Org	17,756,758,077	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		166 Org	14,859,037,851	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78 dok	72,526,496	180,880,000	78 dok	20,000,050	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		78 dok	252,112,100	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	9,727,750	7,451,900	1 Lap	4,843,900	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Lap	87,250,554	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD	16 Lap	47,198,112	42,548,400	16 Lap	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		16 Lap	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	2,941,000	0						Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			19,864,500	0	100%	1,965,000					-	100%	55,000,000	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	19,864,500	0	4 Lap	1,965,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		4 lap	55,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			925,184,674	868,233,200	100%	654,081,900					-	100%	3,162,601,800	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	104,943,740	86,811,000	2 Paket	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		2 Paket	327,601,800	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Pkt	60,208,216	40,000,000	2 Pkt	1,999,900	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		12 Pkt	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	427,787,928	293,418,200	12 Lap	500,000,000	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		12 Lap	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	280,398,640	448,004,000	1 Lap	150,082,000	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Lap	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 dok	51,846,150	0	10 dok	0	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		10 dok	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			877,590,470	1,087,089,000	100%	750,625,905					-	100%	4,274,484,580	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	0	2 Unit	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	0	0	14 Unit	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		30 unit	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	1 Unit	744,625,905	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		1 Unit	3,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	877,590,470	1,087,089,000	30 Unit	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		1 unit	664,484,580	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,125,432,129	2,678,905,200	100%	2,318,120,000					-	100%	5,473,717,350	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0								
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	5,000,000	0	1 Lap	0	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Lap	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	691,610,104	670,500,000	12 Lap	700,000,000	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		12 Lap	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 pkt	96,527,870	105,741,700	2 pkt	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		2 pkt	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	2,332,294,155	1,902,663,500	1 Lap	1,616,120,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Lap	3,848,717,350	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,730,401,884	2,232,366,700	100%	1,007,000,000					-	100%	6,228,794,140	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	229,342,312	251,350,000	7 Unit	250,000,000	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		7 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	176 Unit	1,050,309,623	811,150,000	132 Unit	750,000,000	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		146 unit	2,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	pkt	17,800,000	0	1 pkt	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		1 pkt	67,926,735	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 pkt	69,498,875	143,380,700	1 pkt	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		1 pkt	375,867,405	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	269,534,327	1,026,486,000	4 Unit	1,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		2 unit	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	251,342,940	0	0 Unit	0	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		3 unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	837,128,607	0	6 Unit	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		6 Unit	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	5 paket	5,445,200	0	0	0	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"		6 paket	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			832,868,335	989,676,473	100%	939,676,473					-	100%	926,052,436	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	209,530,167	176,673,573	2 Org	176,673,573	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		2 org	176,052,436	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	178,112,068	163,000,000	2 Paket	2,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		2 Paket	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	34,913,100	50,002,900	2 Orang	50,002,900	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		2 org	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org	410,313,000	600,000,000	2 Org	711,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		2 org	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1,180,454,922	1,266,995,900	100%	926,554,000					-	100%	2,559,037,800	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Pkt	401,826,776	538,999,350	12 Pkt	318,840,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Pkt	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Pkt	249,280,272	380,997,550	12 Pkt	280,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Pkt	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Pkt	529,347,874	346,999,000	12 Pkt	327,714,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Pkt	909,037,800	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			139,097,680	200,000,000	100%	50,000,000					-	100%	365,616,720	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dok	26,156,940	100,000,000	4 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		4 Dok	69,149,280	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Lap	27,309,800	25,000,000	2 Lap	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		2 Lap	65,634,240	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	24,819,500	30,000,000	1 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		1 Dok	79,812,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dok	37,569,640	20,000,000	1 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		1 Dok	93,232,800	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dok	23,241,800	25,000,000	2 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		2 Dok	57,788,400	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1,374,553,205	1,230,147,900	100%	1,049,999,800					-	100%	2,200,000,000	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	360 Lap	1,200,275,759	1,230,147,900	360 Lap	1,050,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		360 Lap	1,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	360 Lap	56,961,500	0	360 Lap	0	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		360 Lap	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	360 Lap	117,315,946	0	360 Lap	0	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		360 Lap	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		**11,055,884,542**	**12,708,712,400**	100%	**3,745,000,600**						100%	**10,486,314,695**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			118,056,118	146,068,500	100%	33,060,000					-	100%	203,667,144	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dok	25,976,200	31,356,800	2 Dok	5,120,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		4 dok	42,234,206	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dok	10,876,000	19,585,500	2 Dok	6,570,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		4 dok	55,291,018	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dok	81,203,918	95,126,200	6 Dok	21,370,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		6 dok	106,141,920	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			10,617,165,759	12,290,314,800	100%	3,610,000,000					-	100%	9,822,014,203	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dok	10,617,165,759	12,290,314,800	12 Dok	3,609,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		12 Dok	9,722,014,203	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	13 Dok	0	0	13 Dok	1,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		13 Dok	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			207,746,988	183,398,000	100%	50,000,600					-	100%	306,306,245	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	350 Dok	118,497,410	80,417,000	50 Dok	20,000,600	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		350 dok	123,712,924	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	80,638,684	94,730,000	1 Kasus	20,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		1 Kasus	168,328,397	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	68 Dok	8,610,894	8,251,000	50 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		66 Dok	14,264,924	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			112,915,677	88,931,100	100%	51,940,000					-	100%	154,327,103	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16 Dok	94,912,350	72,005,900	16 Dok	47,145,500	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		16 dok	104,040,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dok	0	0	0		Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Lap	18,003,327	16,925,200	1 Lap	4,794,500	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		1 Lap	50,287,103	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian		**482,695,682**	**501,657,500**	100%	**150,000,000**						100%	**857,520,000**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			102,008,000	108,310,500	100%	30,000,000					-	100%	196,358,597	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dok	22,925,000	16,838,900	1 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA "		1 Dok	37,037,914	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Lap	52,221,500	48,586,000	4 Lap	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA "		4 Lap	102,015,347	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dok	26,861,500	42,885,600	1 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA "		1 Dok	57,305,336	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			154,483,805	163,624,900	100%	50,000,000					-	100%	229,403,518	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	39,803,555	46,778,000	1 Dok	15,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Dok	63,568,440	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	55,477,600	69,093,800	1 Lap	19,999,900	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Lap	79,981,478	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	59,202,650	47,753,100	1 Lap	15,000,100	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		1 Lap	85,853,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			152,662,426	170,000,000	100%	50,000,000					-	100%	260,766,480	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dok	37,312,294	55,904,000	3 Dok	20,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		3 Dok	76,753,013	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dok	38,892,267	44,396,300	1 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		2 Dok	66,136,147	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Org	76,457,865	69,699,700	50 Org	20,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		100 Org	117,877,320	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			73,541,451	59,722,100	100%	20,000,000					-	100%	170,991,405	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dok	51,664,451	33,675,500	3 Dok	10,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		3 Dok	89,204,937	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dok	21,877,000	26,046,600	1 Dok	5,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		1 Dok	44,380,343	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dok	0	0	1 Dok	5,000,000	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		1 Dok	37,406,125	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H				**37,532,316,331**	**40,418,981,415**		**29,404,625,705**							**53,532,234,695**	

Sedangkan rekapitulasi untuk pedoman pada Tahun 2027 di Sekretariat Daerah terdapat dalam Urusan Pemerintah yang mempunyai 3 Program dan 19 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.404.625.705,00,- dan Tahun 2028 pagu anggaran sebesar Rp. 53.532.234.695,00,- Dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4. 2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2027

No	Bidang Urusan	2027			2028			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	3	19	29.404.625.705	3	19	53.532.234.695	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Merujuk pada hal tersebut, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut tersebut secara terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (outcome) yang ingin diraih.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdiri atae Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua jenis indikator tersebut menjadi acuan dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. IKU disusun untuk menggambarkan capaian sasaran strategis organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome), sehingga menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah. Penyusunan IKU mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, sehingga setiap indikator memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. IKK berorientasi pada keluaran (output) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, seperti kualitas layanan administrasi pemerintahan, tingkat penyelesaian fasilitasi kebijakan, koordinasi antar perangkat daerah, penyusunan regulasi, pelayanan administrasi pimpinan, serta pelaksanaan fungsi pendukung lainnya. Dengan adanya IKK, setiap perangkat pelaksanamemiliki ukuran yang jelas dalam melaksanakan tugas, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan berkesinambungan.

Penyusunan IKU dan IKK dilakukan berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga indikator yang ditetapkan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, indikator yang disusun harus mempertimbangkan ketersediaan data, metode pengukuran yang jelas, target yang realistis namun menantang, serta keselarasan dengan indikator pada tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh proses pengukuran kinerja dapat menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implementasi IKU dan IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya, efisiensi anggaran, kualitas pelayanan, serta kontribusi Sekretariat Daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi terhadap capaian IKU dan IKK dilakukan secara berkala melalui pemantauan, pelaporan, dan reviu kinerja untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi pencapaian target.

Melalui penerapan IKU dan IKK yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, Sekretariat Daerah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, IKU dan IKK menjadi landasan penting dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, pelayanan publik yang berkualitas, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relavan dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (outcome) yang inigin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Sekretariat Daerah.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya.

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra Sekretariat Daerah ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 5. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2030

NO.	Indikator	Satuan	Target							Ket
			2025		2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Realisasi						
1	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,10	2,31	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	98,24	73	76	79	82	85	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,21	4,35	4,4	4,44	4,49	4,54	
4	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persentase	70%	42,8%	76%	82%	88%	94%	100%	
5	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Nilai	3,10	3,12	3,12	3,14	3,16	3,18	3,20	

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025–2030, ditetapkan lima indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama periode perencanaan. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Indeks ABS-SBK ditargetkan mencapai nilai 2,10 pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 2,31, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, target indikator ini meningkat secara bertahap menjadi 2,14 pada tahun 2026, 2,18 pada tahun 2027, 2,22 pada tahun 2028, 2,26 pada tahun 2029, dan mencapai 2,30 pada tahun 2030.

Untuk Indeks Reformasi Hukum, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 70, sedangkan realisasi mencapai 98,24, yang menunjukkan capaian kinerja jauh di atas target. Pada periode berikutnya, target meningkat secara bertahap menjadi 73 pada tahun 2026, 76 pada tahun 2027, 79 pada tahun 2028, 82 pada tahun 2029, dan 85 pada tahun 2030.

Pada indikator Indeks Pelayanan Publik, target tahun 2025 sebesar 4,31, sementara realisasi tercatat 4,21, sehingga masih berada di bawah target yang ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus perbaikan pada tahun-tahun berikutnya dengan target yang terus meningkat, yaitu 4,35 pada tahun 2026, 4,40 pada tahun 2027, 4,44 pada tahun 2028, 4,49 pada tahun 2029, dan 4,54 pada tahun 2030.

Selanjutnya, indikator Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025. Meskipun realisasi tahun 2025 belum dicantumkan, target jangka menengah menunjukkan peningkatan yang konsisten, yaitu 76% pada tahun 2026, 82% pada tahun 2027, 88% pada tahun

2028, 94% pada tahun 2029, hingga mencapai 100% pada tahun 2030. Target tersebut mencerminkan upaya optimalisasi pelaksanaan seluruh kerja sama wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Adapun indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) memiliki target sebesar 3,10 pada tahun 2025 dengan realisasi 3,12, yang berarti telah melampaui target awal. Selanjutnya, target nilai ini ditingkatkan secara bertahap menjadi 3,12 pada tahun 2026, 3,14 pada tahun 2027, 3,16 pada tahun 2028, 3,18 pada tahun 2029, dan 3,20 pada tahun 2030.

Indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, target kinerja Sekretariat Daerah selama periode 2025 -2030 menunjukkan arah peningkatan yang berkelanjutan. Sebagian besar indikator telah melampaui target pada tahun dasar 2025, yaitu indeks ABS – SBK, Indeks Reformasi Hukum, dan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan Indeks Pelayanan Publik masih memerlukan upaya peningkatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menjadi dasar bagi Sekretariat Daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan 2020 – 2030.

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Untuk memastikan capaian kinerja yang terukur dan akuntabel, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

IKK Sekretariat Daerah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan, serta layanan teknis dan administratif yang diberikan.

Tabel 5. 2 INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025		2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Realisasi						
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	62.98	62,09	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76	Bagian Organisasi
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.31	4,21	4.35	4.40	4.44	4.49	4.54	Bagian Organisasi
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	90%	87,01	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Umum
4.	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	Indeks	95	95,00	95	95	95	95	95	Bagian Prokopim
5.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	70	70,19	70.10	70.12	70.15	70.17	70.20	Bagian Perencanaan dan Keuangan
6.	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	Persentase	80,00	85,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Bagian Adm Pembangunan
7.	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	Persentase	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian
8.	Indeks Tata Kelola pengadaan	Indeks	78,60	78,02	81,50	82,50	84,50	86,40	88,40	Bagian PBJ
9.	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,10	2,31	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30	Bagian Kesra
10.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	98,24	73	76	79	82	85	Bagian Hukum Setda
11.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,10	1,6001*	3,12	3,14	3,16	3,18	3,20	Bagian Pemerintahan

Berdasarkan Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Tahun 2025–2030, ditetapkan sebelas indikator kinerja kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan tahun 2025–2030.

Pada Bagian Organisasi, indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditargetkan sebesar 62,98 pada tahun 2025 dengan realisasi 62,09. Selanjutnya target meningkat secara bertahap menjadi 64,28

pada tahun 2026, 65,78 pada tahun 2027, 66,71 pada tahun 2028, 68,93 pada tahun 2029, dan 70,76 pada tahun 2030. Selain itu, Indeks Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 4,31 pada tahun 2025 dengan realisasi 4,21. Target indikator ini juga mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 4,54 pada tahun 2030.

Pada Bagian Umum, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah memiliki target 90% pada tahun 2025, sedangkan realisasi mencapai 87,01%. Target tersebut dipertahankan sebesar 90% setiap tahun hingga tahun 2030 sebagai standar kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menetapkan indikator Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP) dengan target 95 pada tahun 2025 dan realisasi 95,00, yang menunjukkan target telah tercapai. Target nilai ini dipertahankan sebesar 95 hingga tahun 2030 sebagai bentuk konsistensi kualitas pelayanan kepada pimpinan daerah.

Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 70 pada tahun 2025 dengan realisasi 70,19, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Target meningkat secara bertahap menjadi 70,10 pada tahun 2026, 70,12 pada tahun 2027, 70,15 pada tahun 2028, 70,17 pada tahun 2029, dan mencapai 70,20 pada tahun 2030.

Di Bagian Administrasi Pembangunan, indikator Persentase Capaian Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pembangunan ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2025 dengan realisasi 85%, yang menunjukkan capaian melampaui target. Target selanjutnya meningkat secara bertahap menjadi 81% pada tahun 2026, 82% pada tahun 2027, 83% pada tahun 2028, 84% pada tahun 2029, dan 85% pada tahun 2030.

Pada Bagian Perekonomian, indikator Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang Difasilitasi ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2025, namun realisasi baru mencapai 85%. Target tetap dipertahankan sebesar 100% pada setiap tahun hingga tahun 2030 sebagai upaya memastikan seluruh kebijakan pengelolaan perekonomian dapat difasilitasi secara optimal.

Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan ditargetkan sebesar 78,60 pada tahun 2025 dengan realisasi 78,02. Selanjutnya target meningkat secara konsisten menjadi 81,50 pada tahun 2026, 82,50 pada tahun 2027, 84,50 pada tahun 2028, 86,40 pada tahun 2029, dan 88,40 pada tahun 2030.

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), indikator Indeks ABS-SBK memiliki target sebesar 2,10 pada tahun 2025 dengan realisasi 2,31, sehingga telah melampaui target. Target indikator ini terus meningkat hingga mencapai 2,30 pada tahun 2030.

Selanjutnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah menetapkan indikator Indeks Reformasi Hukum dengan target 70 pada tahun 2025, sedangkan realisasi mencapai 98,24, jauh melampaui target yang ditetapkan. Target selanjutnya meningkat secara bertahap hingga mencapai 85 pada tahun 2030.

Adapun pada Bagian Pemerintahan, indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) ditargetkan sebesar 3,10 pada tahun 2025, sedangkan realisasi tercatat 1,6001. Untuk periode selanjutnya, target ditingkatkan secara bertahap menjadi 3,12 pada tahun 2026, 3,14 pada tahun 2027, 3,16 pada tahun 2028, 3,18 pada tahun 2029, dan 3,20 pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah menunjukkan arah peningkatan yang berkesinambungan selama periode 2025–2030. Beberapa indikator telah mampu melampaui target pada tahun dasar 2025, seperti Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, Persentase Capaian Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pembangunan, Indeks ABS-SBK, dan Indeks Reformasi Hukum. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang masih

memerlukan perhatian dan upaya perbaikan, antara lain Nilai SAKIP Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang Difasilitasi, Indeks Tata Kelola Pengadaan, dan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Peningkatan capaian pada indikator-indikator tersebut menjadi fokus strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Renja Sekretariat Daerah disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.

Renja Sekretariat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Sekretariat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat Daerah dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Sekretariat Daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2027;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2027, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
   a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026;
   b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
   c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
   a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
   b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;

d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;

e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025
TANGGAL : 16 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	**SEKRETARIAT DAERAH**	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
2.	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	**INSPEKTORAT DAERAH**	
	Inspektur Daerah	Ketua
	Sekretaris	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	Anggota
4.	**DINAS KESEHATAN**	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	**DINAS SOSIAL**	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubbag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
15.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	**DINAS PERHUBUNGAN**	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris
	Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20.	**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
21.	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22.	**DINAS PERIKANAN**	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	**DINAS PANGAN**	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
24.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
26.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
30.	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS**	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
31.	**KECAMATAN GUGUAK**	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH**	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	**KECAMATAN MUNGKA**	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	**KECAMATAN SULIKI**	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	**KECAMATAN BUKIK BARISAN**	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	**KECAMATAN GUNUANG OMEH**	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	**KECAMATAN LUAK**	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	**KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umun dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	**KECAMATAN HARAU**	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	**KECAMATAN AKABILURU**	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
43.	**KECAMATAN KAPUR IX**	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I